

STUDI TENTANG ANGKA PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BERAU

Aris¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis angka partisipasi politik dalam pemungutan suara pada pemilihan umum, pola angka partisipasi politik dan penyebab munculnya pola angka partisipasi politik di Kabupaten Berau dengan khusus di Kelurahan Gunung Tabur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informant, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, angka partisipasi politik di Kabupaten Berau menunjukkan rata-rata di bawah nasional dan di atas provinsi pada pemilu legislatif dan pada pemilu presiden rata-rata angka partisipasi politik Kabupaten Berau di bawah nasional dan provinsi. Kedua, pola angka partisipasi politik di Kabupaten Berau menunjukkan pola yang naik-turun dengan trend yang menurun cenderung stabil. Ketiga, penyebab munculnya pola angka partisipasi politik di Kabupaten Berau beragam, mulai dari figure yang kurang dikenal masyarakat, calon pemimpin kurang melakukan kampanye kelapangan hingga permasalahan administrasi dan sosialisasi yang kurang. Untuk khusus di Kelurahan Gunung Tabur rata-rata angkanya di bawah nasional dan di atas provinsi serta kabupaten. Pola yang ditunjukkan adalah naik-turun dengan trend yang meningkat. Penyebab munculnya pola angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur tidak berbeda jauh dengan yang di tingkat kabupaten, namun yang paling terlihat jelas pada pemilu gubernur yang mengalami penurunan disebabkan karena adanya kekecewaan masyarakat terhadap calon yang ada tidak berasal dari Berau dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara.

Kata Kunci: *Angka, partisipasi, politik, pemilihan umum, trend, pola, Berau, Gunung Tabur*

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sebuah alat yang penting dalam instrument negara demokrasi. Pemilu bahkan menjadi tolak ukur stabil dan dinamisnya demokrasi suatu negara. Selain itu, pemilu memiliki peran sebagai sarana

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: arisahmad31@gmail.com

pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga dapat terwujud pendewasaan, pencerdasan dan pemahaman politik terhadap masyarakat. Melalui pemilu akan diwujudkan suatu mekanisme demokrasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi. Masyarakat harus menyadari bahwa fungsi pemilu bukan hanya untuk memilih pemimpin baru tetapi lebih dari itu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan keabsahan pemerintah.

Karakteristik dari pemilihan umum ditandai dengan adanya partisipasi dari warga dalam kehidupan politik. Bahkan ada yang mengatakan jika partisipasi politik warga negara tinggi maka tingkat demokrasi suatu negara tersebut baik, begitupun sebaliknya. Partisipasi politik memiliki banyak pengertian, namun yang paling lumrah yakni keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah penting, dan belakangan ini banyak dijadikan sebagai bahan diskusi untuk dipelajari dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Kegiatan partisipasi politik mencakup beberapa kegiatan seperti: kampanye, mencoblos, diskusi politik, pemungutan suara, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya (Miriam Budiardjo,2008:).

Adapun di Indonesia, trend angka partisipasi pemilih terlihat mengalami penurunan, baik untuk pemilihan umum, pemilihan presiden, maupun kepala daerah. Tingkat partisipasi politik pada pemilu pertama tahun 1955 dan orde baru pada tahun 1971 sampai 1997, kemudian orde reformasi tahun 1999 sampai sekarang masih cukup tinggi. Tingkat partisipasi pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen. Pada era orde baru partisipasi politik terlihat stabil yakni berada kisaran 90 persen ke atas. Tahun 1971 tingkat partisipasi 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis menjadi 3,4 persen. Kemudian pemilu tahun 1977 dan 1982 angka partisipasi politiknya sama yakni 96,5 persen dengan tingkat golput hanya 3,5 persen. Pada pemilu 1987 tingkat partisipasi politik mencapai 96,4 persen dan jumlah golput hanya 3,6 persen. Pada pemilu 1992 tingkat partisipasi politik mencapai 95,1 persen dengan tingkat golput 4,9 persen. Untuk pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen (Merdeka.com, 16 februari 2019). Pasca-reformasi, pada pemilu 1997 tingkat partisipasi politik 92,6 persen dan jumlah golput 7,3 persen. Meningkatnya jumlah golput secara signifikan baru terjadi pada pemilihan langsung yang dimulai lewat pemilu legislatif dan presiden tahun 2004 yakni sebesar 15,9 persen dan partisipasi politik hanya 84,1 persen. Bahkan untuk Pilpres putaran I dan II tahun itu mengalami penurunan yakni tingkat partisipasi politik putaran I 78,2 persen dan putaran II 76,6 persen dengan tingkat golput masing-masing sebesar 21.18 persen dan 23,4 persen. Pada pemilu legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput

semakin meningkat 29,1 persen. Pada pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. Kemudian pada pemilihan legislatif tahun 2014 angka partisipasi politik mencapai 75,2 persen dan golput mencapai 24,8 persen, sedangkan pemilihan presiden tahun 2014 partisipasi politik mencapai 70,9 persen dan angka golput 29,1 persen (Merdeka.com, 16 februari 2019).

Di Kalimantan Timur angka partisipasi politik lebih memprihatinkan dibandingkan dengan nasional. Pada tahun 2004 pada Pemilihan legislatif DPRD Kaltim angka partisipasi pemilih mencapai 77,71 persen dengan angka golput 22,28 persen. Pilpres 2004 putaran pertama 70,5 persen dengan angka golput 29,5 persen sedangkan diputaran kedua 66,4 persen dan angka golput sebesar 33,6 persen. Pada tahun 2008 pemilihan gubernur putaran pertama angka partisipasi mencapai 67,33 persen dan angka golput 32,77 persen dan pada putaran kedua angka partisipasi 57,1 persen dan angka golput 42,9 persen. Sementara itu Pemilihan presiden tahun 2009 angka partisipasi mencapai 67,58 persen dan angka golput 32,41 persen. Pemilihan legislatif tahun 2009 partisipasi politik 67 persen dan tingkat golput 33 persen. Pemilihan gubernur tahun 2013 angka partisipasi politik mengalami penurunan dari pemilihan gubernur sebelumnya yaitu sebesar 55,81 persen dan tingkat golputnya mencapai 44,19 persen. Tahun 2014 pemilihan presiden dan legislatif masing-masing angka partisipasi politik yakni 62,63 persen dan 68,15 persen dan tingkat golput yaitu 37,37 persen dan 31,85 persen. Sementara itu untuk pilkada serentak tahun 2015 angka partisipasi politik mencapai 56,97 persen dan angka golput 43,03 persen, kemudian pada pemilihan gubernur tahun 2018 lalu angka partisipasi politik 58,16 persen dengan tingkat golput mencapai 43,03 persen (KPU Kaltim, 2018).

Dengan melihat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait angka partisipasi politik di Kabupaten Berau. Adapun alasan lain penulis tertarik melakukan penelitian ini karena belum ada penelitian yang meneliti tentang permasalahan ini secara rinci dan spesifik.

Kerangka Dasar Teori

Pemilihan Umum

Definisi Pemilihan Umum

Menurut Andrew Reynold (dalam Seta Basri, 2011:125) pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya terdapat suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil rakyat yang akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan negara. Hal yang senada disampaikan oleh Teuku May Rudy (2009:87) dimana pemilihan umum didefinisikan dengan penjawatahan dari sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan struktur pemerintahan. Ada pula Santoso dan Supryanto (2004:53) mengatakan bahwa pemilihan umum

merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai itu pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Lain pula yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum (2004:29) yang mengatakan bahwa pemilihan umum adalah kompetisi politik yang dirancang secara adil dan terbuka. Oleh karena itu, dilarang keras melakukan kecurangan.

Menurut Janedjri M. Gaffar (2013:38-39), secara pelaksanaan sistem pemilu pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem proporsional dan sistem distrik. Sistem proporsional adalah satu wilayah yang besar memilih beberapa wilayah yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pembagian jumlah penduduk. Sedangkan sistem distrik adalah satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih satu wakilnya atas dasar pluralis. Saat ini Indonesia memakai sistem proporsional, yang kemudian diperkuat dengan suara terbanyak dalam penentuan calon terpilih.

Dalam pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa pemilu merupakan suatu aktivitas politik yang di dalamnya terdapat kegiatan kampanye, propaganda, pemungutan suara dan lain-lain yang bertujuan untuk memilih pemimpin pada jabatan pemerintahan. Selain itu pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat karena rakyat dilibatkan dalam sebuah keputusan politik dan kebijakan negara.

Bentuk-Bentuk Pemilihan Umum

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu pemilu langsung dan pemilu tidak langsung (Seputarpengetahuan.co.id, 20 Februari 2019).

1. Pemilu Langsung

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan suara. Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.

2. Pemilu Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

Dari uraian di atas bentuk-bentuk pemilihan umum dibagi menjadi dua meliputi pemilu langsung dan pemilu tidak langsung. Pada penelitian ini penulis

akan membahas pemilu langsung yang mana di dalamnya terdapat proses pemberian suara secara langsung ke TPS tanpa melewati lembaga perwakilan.

Jenis-Jenis Pemilihan Umum

Adapun jenis-jenis pemilu di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif (Pinterpandai.com, 20 Februari 2019):

1. Pemilu Legislatif adalah pemilu yang dilaksanakan untuk memilih parlemen atau anggota-anggota DPD, DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten-Kota, pemilihan umum anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik.

2. Pemilu eksekutif adalah pemilu yang dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kabupaten dan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kota.

Jadi dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pemilihan umum terdiri atas dua yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Pada penelitian ini kedua jenis-jenis pemilihan umum akan menjadi pembahasan penulis.

Tingkatan Pemilihan Umum

Adapun tingkatan pemilu di Indonesia dibagi atas dua bagian yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal (Republika.co.id, 20 Februari 2019):

1. Pemilu Nasional

Pemilu nasional adalah pemilu yang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD pada waktu bersamaan.

2. Pemilu Lokal

Pemilu lokal dibagi menjadi dua bagian yakni pemilu lokal tingkat provinsi untuk memilih Gubernur dan DPRD Provinsi lalu pemilu lokal tingkat Kabupaten untuk memilih Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan dilakukan dalam waktu bersamaan namun berbeda dengan waktu pemilu nasional

Merujuk pada uraian sebelumnya bahwa tingkatan pemilihan umum terdapat dua tingkatan, tingkatan nasional dan tingkatan lokal. Pemilu tingkat nasional untuk memilih presiden, anggota DPR dan DPD sedangkan pemilu lokal dapat dibagi menjadi dua yakni pertama pemilu lokal tingkat provinsi untuk memilih Gubernur dan DPRD Provinsi, kedua pemilu lokal tingkat Kabupaten/Kota untuk memilih Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.. Dalam penelitian ini penulis akan membahas kedua tingkatan pemilu tersebut, baik pemilu nasional maupun pemilu lokal.

Angka Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara

Pemerintah membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan politik yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam

melaksanakan fungsi dan tugasnya diperlukan hal yang dapat mengontrol pemerintah. Sherman dan Kolker (dalam Suryadi 2007:128) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan jalan bagi massa untuk mempengaruhi atau mengontrol pemerintah. Gagasan senada disampaikan oleh United Nation Development Programme (Haris 2007:57) bahwa sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan dalam proses bernegara dan pemerintahan. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana tenaga, maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat.

Berdasarkan pasal 1 ayat (15) dalam PKPU No 26 Tahun 2013, pemungutan suara adalah proses pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik dan /atau pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD, Provinsi/ DPRA/ DPRP/ DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada surat suara Pemilu Anggota DPR. DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, dan mencoblos nama calon anggota DPD pada surat suara Pemilu Anggota DPD. Pada pasal 1 ayat (22) PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.

Dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa angka partisipasi politik adalah jumlah warga negara yang ikut serta dalam aktivitas politik yang disimbolkan dalam bentuk numerik atau persentase yang bertujuan untuk memilih pemimpin, mempengaruhi keputusan pemerintah, memberikan suara dalam pemilihan umum, sementara pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh warga negara dalam rangka memilih calon pemimpin dengan cara mencoblos di tempat pemungutan suara. Maka angka partisipasi politik dalam pemungutan suara adalah jumlah warga negara yang ikut dalam pemungutan suara yang disimbolkan dalam bentuk numerik jumlah warga negara atau persentase. Angka partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting bagi negara demokrasi.

Angka Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemilu adalah suatu aktivitas politik yang di dalamnya terdapat kegiatan kampanye, propaganda, pemungutan suara dan lain-lain yang bertujuan untuk memilih pemimpin pada jabatan pemerintahan. Sementara itu angka partisipasi politik dalam pemungutan suara adalah jumlah warga negara yang ikut dalam pemungutan suara yang disimbolkan dalam bentuk numerik atau persentase. Jadi angka partisipasi politik dalam pemungutan suara pada pemilu merupakan jumlah warga negara yang ikut dalam pemungutan suara pada pemilihan umum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendiskripsikan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono (2006:2) Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Berau di Kelurahan Gunung Tabur.

Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Angka partisipasi politik dalam pemungutan suara di tingkat nasional dan provinsi dibandingkan dengan Kabupaten Berau, di bawah rata-rata atau di atas rata-rata Kabupaten Berau.
- b. Pola angka partisipasi politik dalam pemungutan suara di Kabupaten Berau dibandingkan dengan angka partisipasi politik di tingkat nasional dan provinsi.
- c. Penyebab dari munculnya pola angka partisipasi politik dalam pemungutan suara di Kabupaten Berau.
- d. Angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur pada pemilu serentak 2019 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, angka partisipasinya di bawah/di atas rata-rata nasional, provinsi dan kabupaten, polanya dan penyebabnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan sampel atau informan. *Purposive Sampling* adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Adapun komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian

Angka Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Berau

Angka partisipasi politik merupakan elemen penting dalam pemilihan umum, dengan adanya hal itu maka suatu kontestasi politik dapat dilihat hasilnya. Salah satu indikator keberhasilan dari pemilihan umum dilihat dari tingkat angka partisipasi politiknya. Apabila angka partisipasi politiknya di bawah rata-rata

yang telah ditetapkan, maka sudah tentu ada sebuah permasalahan yang terjadi. Begitupun dengan sebaliknya ketika angka partisipasi politiknya mencapai target yang telah ditentukan maka ada sebuah prestasi dari pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Melihat dari beberapa pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Indonesia baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten angka partisipasi politik selalu menjadi sorotan. Permasalahan yang terjadi setelah era orde baru berakhir yaitu pola angka partisipasi politik di berbagai tingkatan pemilu mengalami penurunan baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten Berau.

Berdasarkan data yang telah diolah dapat diperhatikan bahwa pemilihan umum di tingkat nasional baik itu legislatif maupun eksekutif pola yang diperlihatkan memang menurun setelah era orde baru. Namun, angka partisipasinya selalu di atas 70%. Bahkan pada pemilu 2019 yang lalu angka partisipasi politik untuk pemilihan Presiden tertinggi setelah orde baru. Berbeda dengan pemilihan umum yang dilaksanakan di tingkat provinsi angka partisipasi politiknya selalu di bawah nasional, bahkan angka partisipasi politiknya di bawah 70% sebelum pemilihan umum 2019 yang lalu. Pada pemilu yang di tingkat nasional baik itu pemilu legislatif maupun eksekutif (pilpres) angka partisipasi politiknya di atas 60%. Bertolak belakang dengan pemilu di tingkat lokal baik itu pilgub atau pilbup yang angka partisipasi politiknya di bawah 60%.

Sedangkan untuk Kabupaten Berau angka partisipasi politik mengalami pola yang naik turun, dimulai dari pemilu Bupati yang awalnya 79% lalu menurun menjadi 65% dan yang terakhir menjadi 63%. Begitu pula dengan pemilu Gubernur yang mengalami penurunan sangat drastis dari 62% pada tahun 2013 menjadi 52% pada tahun 2018. Pada pemilu legislatif pola yang ditunjukkan adalah menaik awalnya 69% lalu 70% dan yang terakhir 79%. Lalu untuk pemilu Presiden polanya naik turun yang awalnya 65% lalu 55% dan yang terakhir 77%.

Selanjutnya dalam melihat perbandingan angka partisipasi politik tentu perlu diketahui rata-rata dari setiap tingkatan pemilu. Penghitungan rata-rata dihitung berdasarkan pemilu yang sama karena pemilu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten memiliki perbedaan waktu dalam segi pelaksanaan terutama pemilu yang sifatnya lokal. Rata-rata angka partisipasi politik pada pemilu legislatif di tingkat Kabupaten Berau di bawah rata-rata nasional, sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat provinsi angka partisipasi politik di Kabupaten Berau di atas rata-rata. Pada pemilu presiden rata-rata angka partisipasi politik di tingkat Kabupaten Berau masih dibawah rata-rata nasional. Begitupun dengan tingkat provinsi yang rata-rata angka partisipasinya di atas rata-rata angka partisipasi politik di Kabupaten Berau.

Pola Angka Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara di Kabupaten Berau

Pola angka partisipasi politik dalam pemilihan umum tentunya memiliki banyak perbedaan dari yang naik-turun, menurun bahkan ada yang meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya suatu hal yang menjadi permasalahan mulai dari masalah sebelum pelaksanaan pemilu hingga pada tahap pemilu

dilaksanakan. Maka dari itu penting untuk diketahui pola angka partisipasi politik pada pemilu baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten Berau. Oleh sebab itu perlu dipaparkan secara rinci melalui data-data yang telah didapatkan lalu kemudian dibandingkan dari tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten Berau.

Pola yang terbentuk pada pemilu di Indonesia adalah naik-turun, namun trend yang ditunjukkan adalah menurun sejak pemilu pertama dilaksanakan. Lalu pada pemilu di Kalimantan Timur pola yang ditunjukkan adalah naik-turun sedangkan trend yang terbentuk yaitu meningkat. Pada pemilu di tingkat Kabupaten Berau pola yang terbentuk adalah naik-turun. Sedangkan trend yang terbentuk pada pemilu di Kabupaten Berau adalah menurun tapi tidak signifikan atau relatif sama.

Penyebab dari Munculnya Pola Angka Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara di Kabupaten Berau

Pola angka partisipasi politik tentunya memiliki satu hal yang membuat pola itu dapat terbentuk. Pola yang naik tentu memiliki penyebabnya tersendiri begitupun dengan pola yang menurun yang tentu punya permasalahannya. Dari melihat pola angka partisipasi tersebut bisa dicari tahu apa penyebabnya sehingga kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi. Maka dari itu perlu mengetahui penyebab dari munculnya pola angka partisipasi politik pada pemilihan umum khususnya di Kabupaten Berau. penyebab munculnya pola angka partisipasi politik ada beberapa, bila melihat dari pemilu bupati yang menjadi penyebab pola itu menurun karena figure yang ada masih kurang dikenal oleh masyarakat dan program yang disampaikan masih belum menyentuh kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada pemilu gubernur penyebabnya karena figure yang menjadi calon gubernur tidak berasal dari Berau dan ditambah lagi tidak melakukan kampanye secara langsung di Kabupaten Berau. Pada pemilu presiden masyarakat masih menunjukkan antusias yang tinggi karena pemilu presiden banyak diberitakan di media-media sehingga masyarakat tahu dari calon yang ada. Sedangkan pada pemilu legislatif calon yang ada langsung terjun kelapangan sehingga mereka bertemu langsung jadi mereka tahu calonnya.

Selain itu penyebab lain mengapa pola angka partisipasi politik Kabupaten Berau menurun pada pemilu gubernur dikarenakan tim kampanye dari provinsi tidak langsung turun kelapangan sehingga sosok calon gubernur tidak dikenal masyarakat. Kemudian hal kedua yang membuat menurun adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara serta tim sukses kepada masyarakat mengenai pemilu. Ketiga, masyarakat sudah banyak yang cerdas dalam memilih, memilih bukan lagi karena partai tetapi melihat benar-benar figure dari calon gubernur. Dan yang terakhir faktor yang menyebabkan mengapa pada pemilu gubernur pola angka partisipasinya menurun karena pelaksanaan pemilu bertepatan dengan hari libur sehingga masyarakat kurang berpartisipasi.

Pada pemilu bupati pola yang ditunjukkan menurun, penyebab munculnya pola yang menurun ini karena calon yang ada hanya dua dan figure yang menjadi

calon kurang dikenal masyarakat sehingga berdampak pada tingkat partisipasi. Selain itu masyarakat sudah cerdas dalam berpolitik sehingga mereka memilih bukan lagi berdasarkan partainya tetapi berdasarkan program apa yang ditawarkan. Pola angka partisipasi politik pada pemilu gubernur mengalami penurunan hal ini disebabkan karena masalah administrasi serta kekecewaan masyarakat terhadap calon yang ada bukan dari Berau, kurangnya sosialisasi penyelenggara dan tim sukses mengenai pemilu dan memang pada saat itu bertepatan dengan hari libur.

Angka Partisipasi Politik di Kelurahan Gunung Tabur pada pemilu serentak 2019 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya

Angka partisipasi pada pemilu serentak 2019 di Kelurahan Gunung Tabur angkanya sangat tinggi yakni untuk pemilu presiden 78,4 persen dan pemilu legislatif 81,5%. Jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya maka hasilnya begitu berbeda drastis. Pada pemilu gubernur saja angka partisipasi politiknya hanya 60,5% terendah dari kelima pemilu yang ada di Kelurahan Gunung Tabur. Pada pemilu 2019 angka partisipasi politiknya meningkat begitu drastis dari pemilu bupati 2015, jika pada pemilu bupati 2015 hanya 68% tapi pada pemilu 2019 di atas 70%. Sedangkan pada pemilu 2014, ada peningkatan yang begitu signifikan. Pada pemilu 2014 pemilu presiden angka partisipasi politiknya 66,1%, mengalami peningkatan pada pemilu presiden 2019 yaitu 78,4%. Begitupula dengan pemilu legislatif yang pada pemilu 2014 angka partisipasi politikya hanya 66,7% dan pada pemilu 2019 peningkatan yang sangat drastis yaitu mencapai angka 81,5%.

Rata-rata angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur hanya bekisar pada angka 69,36%. Ini dikalkulasikan melalui keseluruhan data yang ada yaitu hanya pada pemilu 2014-2019. Untuk data pemilu sebelumnya, data yang tersedia untuk wilayah kelurahan Gunung Tabur hanya pada pemilu 2014-2019. Oleh karena itu penelitian ini hanya menghitung rata-rata dari pemilu 2014-2019. Dari pengolahan data yang ada dapat disimpulkan bahwa rata-rata angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur di atas rata-rata angka partisipasi politik di tingkat provinsi dan kabupaten. Sedangkan untuk di tingkat nasional, rata-rata angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur di bawah rata-rata angka partisipasi politik di tingkat nasional.

Setiap pelaksanaan pemilu ke pemilu tentu memiliki pola yang berbeda beda, ada yang meningkat dan menurun. Pada pemilu di tingkat nasional pola yang ditunjukan yaitu naik-turun, begitu pula dengan yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten. Lalu bagaimana dengan yang ada di Kelurahan Gunung Tabur, apakah polanya meningkat atau menurun. Dari data yang diperloeh dapat diambil benang merahnya bahwa pola angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur naik-turun. Hal ini bisa dilihat melalui gambar yang ada, pada pemilu legislatif 2014 ke pemilu presiden 2014 menurun lalu kemudian meningkat pada pemilu bupati 2015. Setelah itu kembali mengalami penurunan pada pemilu gubernur 2018 dan

kembali mengalami peningkatan pada pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019. Sedangkan trend yang terbentuk adalah meningkat.

Pada dasarnya pola angka partisipasi politik baik itu naik atau turun pasti ada penyebabnya. Seperti pada pemilu di tingkat kabupaten tentunya di Kelurahan Gunung Tabur ada penyebab munculnya pola angka partisipasi politik. Maka dari itu perlu ditelaah lebih dalam apa penyebab munculnya pola angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur. Penyebab munculnya pola angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur. Penyebab munculnya pola angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur memang beragama, mulai dari kesibukan masyarakat pada pekerjaannya sehingga menganggap pemilu hanya pengganggu pekerjaannya, faktor jarak yang begitu jauh dengan lokasi pencoblosan ditambah lagi akses transportasi yang minim, figure yang kurang dikenal oleh masyarakat. Pada pemilu bupati memang angka partisipasinya meningkat disebabkan calon bupati yang ada langsung terjun kelapangan untuk kampanye dan memang masyarakat sadar bahwa pemilu bupati untuk memilih pemimpin Berau kedepannya. Selain itu pada pemilu gubernur permasalahannya yaitu kurang dikenalnya calon gubernur yang akan memimpin Kalimantan Timur dan tidak adanya kampanye dari tim sukses untuk daerah Gunung Tabur.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Angka partisipasi politik di Kabupaten Berau tergolong dinamis, sebab setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki angka partisipasi politik yang berbeda-beda dan itu tergantung jenis pemilunya. Pada pemilu legislatif rata-rata angka partisipasi politik Kabupaten Berau di bawah rata-rata angka partisipasi politik tingkat nasional. Begitupun dengan pemilu presiden rata-rata angka partisipasi politik Kabupaten Berau di bawah rata-rata tingkat nasional. Sedangkan pada pemilu legislatif rata-rata angka partisipasi politik Kabupaten Berau di atas rata-rata angka partisipasi politik di tingkat provinsi. Tetapi pada pemilu presiden rata-rata angka partisipasi politik Kabupaten Berau di bawah rata-rata angka partisipasi politik tingkat provinsi.
2. Pola angka partisipasi politik di Kabupaten Berau menunjukkan pola yang turun-naik dan trend yang ditunjukkan adalah menurun tapi tidak drastis atau relative stabil. Perbandingan yang begitu terlihat yaitu pola angka partisipasi politik di tingkat nasional menunjukkan pola yang naik-turun tidak begitu drastis, begitupun dengan pemilu di tingkat provinsi yang naik-turun namun lebih mengarah pada meningkat. Jika dibandingkan dengan pola angka partisipasi politik di Kabupaten Berau yang naik-turunnya begitu drastis, terutama dari pemilu gubernur 2018 ke pemilu serentak 2019.
3. Penyebab pola angka partisipasi politik di Kabupaten Berau sangatlah beragam yaitu karena figur yang ada kurang dikenal masyarakat, kekecawaan masyarakat karena tidak adanya calon dari Berau, dan kurangnya kampanye yang dilakukan calon di daerah Kabupaten Berau. Selanjutnya disebabkan karena jumlah calon yang ada terbatas dan program dari para calon dirasa

kurang menyentuh masyarakat. Pada pemilu legislatif menunjukkan pola yang menaik disebabkan karena para calon anggota legislatif melakukan kampanye langsung terjun kelapisan masyarakat, sehingga masyarakat mengenal calon legislatif dan pergi ke TPS untuk mencoblos pilihan mereka.

4. a. Angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur pada pemilu 2019 sangatlah tinggi. Rata-rata angka partisipasi politik di tingkat Kelurahan Gunung Tabur di atas rata-rata kabupaten dan provinsi. Sedangkan pada pemilu di tingkat nasional rata-rata angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur di bawah rata-rata nasional.
- b. Pola angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur yaitu naik-turun tetapi trend yang diperlihatkan adalah menaik. Meskipun hanya dalam kurun waktu empat pemilu tetapi dapat dilihat bahwa pola yang ditunjukkan tidak berbeda jauh dengan pola angka partisipasi politik yang ada di tingkat kabupaten.
- c. Penyebab angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur mengalami naik-turun disebabkan berbagai kendala yaitu karena calon yang ada hanya dua dan tidak banyak pilihan bagi masyarakat. dengan pemilu gubernur yang polanya menurun disebabkan kekecawaan masyarakat terhadap calon yang tidak ada dari daerah dan figure yang ada tidak begitu dikenal. Selain itu kurangnya sosialisasi yang diberikan penyelenggara pemilu dan calon gubernur.

Saran

1. Dikarenakan rata-rata angka partisipasi politik di Kabupaten Berau di bawah rata-rata nasional maka seharusnya pemerintah, partai politik, calon yang menjadi peserta dan pelaksana pemilu dalam hal ini KPU haruslah lebih kerja keras dalam meningkatkan angka partisipasi politik melalui memperbanyak sosialisasi mengenai pentingnya pemilu, lalu mengencarkan pendidikan politik yang bukan hanya sekedar mengajak masyarakat sebagai partisipan pemilu tetapi bergerak diwilayah yang kemanfaatannya berguna bagi masyarakat melalui upaya politik.
2. Melihat pola angka partisipasi politik yang sebagian besar pemilu di Kabupaten Berau mengalami pola yang menurun maka seharusnya seluruh stakeholder yang terlibat haruslah bekerja sama secara proaktif dan akan lebih baik ketika seluruh pemilu dilaksanakan secara serentak agar masyarakat tidak jenuh terhadap pergelaran pemilu.
3. Sehubungan dengan banyaknya penyebab munculnya pola angka partisipasi politik mulai dari figur yang kurang dikenal, sosialisasi yang kurang maksimal dan permasalahan administrasi lainnya maka seharusnya seluruh pihak yang terlibat terutama para calon bupati dan gubernur lebih turun langsung kemasyarakat sehingga masyarakat tahu siapa calon pemimpin daerahnya.

Kemudian untuk permasalahan administrasi, KPU selaku penyelenggara pemilu sebaiknya lebih mempersiapkan dengan matang, mulai dari hal yang paling kecil ke hal paling besar.

4. Mengingat angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur yang rata-rata angka partisipasi politiknya masih di bawah rata-rata nasional maka seharusnya perlu adanya perbaikan dari semua stakeholders yang terlibat dengan cara lebih menasar pada pemilih-pemilih yang suaranya mudah untuk dipengaruhi untuk mereka diberikan pengetahuan mengenai politik. Pemilih-pemilih yang disasar seperti pemilih pemula, swing voters, pemilih usia lanjut, mereka yang kurang akses informasi yang berpotensi golput..
5. Dikarenakan pola angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur yang pola angka partisipasinya naik-turun dan trendnya menaik, maka yang sangat perlu dilakukan yaitu masyarakat harus diberikan lebih banyak pendidikan politik oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah setempat baik itu tingkat kelurahan maupun kecamatan agar partisipasi masyarakat dapat stabil dan meningkat.
6. Oleh karena penyebab munculnya pola angka partisipasi politik di Kelurahan Gunung Tabur lebih disebabkan karena figure yang kurang dikenal dan sosialisasi yang kurang menyentuh langsung, maka seharusnya ada aturan dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk memperbanyak sosialisasi dan para calon lebih banyak terjun langsung ke lapangan.

Daftar Pustaka

- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner. Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Rudy, Teeku May. 2009. *Pengantar Ilmu Politik. Wawasan Pemikiran dan Kegunanaannya*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Topo Santoso dan Didik. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004.
- Suryadi, Badi. 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: Ghalia Indonesia.
- Urbaningrum, Anas. 2004. *Pemilu Orang Biasa: Publik Bertanya Anas Menjawab*. Jakarta: Republika.

Dokumen:

- KPU. 2013. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara*

adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KPU. 2018. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.* Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sumber Internet:

<https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemil1955-2014.html> diakses pada tanggal; 16 februari 2019

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html> diakses pada tanggal 20 februari 2019

<https://www.pinterpandai.com/jenis-pemilu-di-indonesia/> diakses pada tanggal 20 februari 2019 dan 30 Januari 2019.